

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Accepted: Oktober 2025 | Revised: November 2025 | Published: Desember 2025 |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

PENGUATAN MANAJEMEN SYARIAH SEBAGAI PENGEMBANGAN DALAM INDUSTRI BISNIS

Nur Fadilah

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri

email: nurfadillah@gmail.com

Moh. Uzeir Mustaqfirin

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri

email: moh.uzeir@gmail.com

Ulya Ardhia Cayani Ahmad

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri

email: ulyaardhia@gmail.com

Abstract

This study examines the strengthening of sharia management as an aspect of development in the industrial sector. The industrial sector has seen substantial growth in recent years, in reaction to global demand for products and services compliant with sharia guidelines. Where the process to produce goods starts from processing raw materials, into semi-finished products which are then further processed into finished goods. However, to ensure sustainable growth and face future challenges, effective management from a sharia perspective is essential. This research aims to find out how strengthening sharia management can function as a development in the industrial sector. Qualitative methods were chosen to gather information from a variety of sources, such as literature reviews, interviews with industry experts, and analysis of company documents. Then, the information is analyzed using relevant qualitative analysis methods. The findings of the study show that strengthening sharia management can provide significant benefits in business development in the industrial sector. In conclusion, strengthening sharia management as a strategy for industrial business development is able to create long-term added value for the company, increase customer reputation and trust, and encourage substantial growth. Therefore, the advice for practitioners and decision-makers in the industry is to prioritize the effective implementation of sharia management in their business strategies, paying attention to aspects of ethics, quality, and innovation that are in line with sharia principles.

Keywords: *Sharia Management, Business Industry.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai penguatan manajemen syariah sebagai aspek pengembangan dalam sektor industri. Sektor industri telah melihat pertumbuhan yang substansial dalam beberapa tahun terakhir, sebagai reaksi terhadap permintaan global untuk produk dan layanan yang sesuai dengan pedoman syariah. Dimana proses untuk memproduksi barang dimulai dari pengolahan bahan mentah, menjadi produk setengah jadi yang kemudian diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Namun, untuk menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan serta menghadapi tantangan di masa mendatang, manajemen yang efektif dari sudut pandang syariah sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penguatan manajemen syariah dapat berfungsi sebagai pengembangan dalam sektor industri. Metode kualitatif dipilih untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti tinjauan pustaka, wawancara dengan pakar industri, dan analisis dokumen perusahaan. Kemudian, informasi tersebut dianalisis dengan metode analisis kualitatif yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan manajemen syariah dapat memberikan keuntungan yang signifikan dalam pengembangan bisnis di sektor industri. Kesimpulannya, penguatan manajemen syariah sebagai strategi untuk pengembangan bisnis industri mampu menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi perusahaan, meningkatkan reputasi dan kepercayaan pelanggan, serta mendorong pertumbuhan yang substansial. Oleh karena itu, saran bagi para praktisi dan pengambil keputusan dalam industri adalah untuk mengedepankan penerapan manajemen syariah yang efektif dalam strategi bisnis mereka, dengan memperhatikan aspek etika, kualitas, dan inovasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Manajemen Syariah, Industri Bisnis.

Pendahuluan

Manajemen syariah mencerminkan suatu pendekatan pengelolaan yang berasaskan nilai-nilai syariah Islam, mencakup prinsip keadilan, transparansi, dan ketaatan terhadap ketentuan hukum Islam. Implementasi prinsip ini berpotensi mendukung perusahaan dalam mencapai keberhasilan berkelanjutan serta stabilitas keuntungan. Namun demikian, penerapannya di berbagai perusahaan masih belum terlaksana secara optimal (Nawawi 2010). Di era digitalisasi saat ini, tidak dapat disangkal bahwa inovasi yang muncul di sekitar kita dapat memberikan dampak yang signifikan serta menguntungkan, sementara itu juga membantu mengurangi kerumunan untuk memutus rantai penyebaran pandemi yang sedang terjadi (Budiarta, K., Ginting, S. O., & Simarmata, 2020).

Sektor industri yang terus maju seiring dengan kemajuan teknologi tentunya mempengaruhi perekonomian sebuah negara, serta membawa masyarakat ke dalam era ekonomi digital. Pemanfaatan alat-alat seperti komputer dan internet merupakan langkah awal dari kemajuan e-commerce atau perdagangan elektronik. Seiring dengan perubahan teknologi, masa ekonomi digital yang lama perlahan-lahan bertransformasi menjadi masa ekonomi digital yang baru, yang ditandai dengan adanya teknologi seluler, akses internet tanpa batas, serta munculnya teknologi cloud yang dimanfaatkan dalam berbagai proses ekonomi digital (Van Ark, Erumban, Corrado, & Levanon: 2016).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan adanya kebutuhan bagi umat Islam untuk memperluas pemanfaatan teknologi digital disertai arahan dan pengawasan yang tepat,

sehingga pengembangannya dapat memberikan hasil yang optimal. Namun demikian, tantangan tetap ada, mengingat digitalisasi pada beberapa aspek kerap berseberangan dengan nilai-nilai Islam, contohnya dalam kajian mengenai kloning.

Ilmu kloning tidak dianggap terlarang jika ditujukan untuk manfaat positif, tetapi terdapat beberapa peneliti yang menyalahgunakan ilmu ini untuk menciptakan manusia. Terdapat berbagai hambatan dalam upaya memperkuat penerapan manajemen syariah, seperti rendahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah, kurangnya dukungan dari pihak manajemen maupun karyawan, serta ketiadaan regulasi yang tegas dari pemerintah terkait penerapan manajemen syariah. Selain itu, masih muncul kekhawatiran di kalangan investor dan konsumen mengenai tingkat keamanan dan keandalan produk yang dihasilkan oleh perusahaan berbasis syariah. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih serius untuk mendorong implementasi manajemen syariah sebagai strategi pengembangan bisnis. Pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku industri diharapkan dapat berkolaborasi dalam meningkatkan pemahaman tentang manajemen syariah serta menyusun regulasi yang lebih jelas dan tegas guna memperkuat penerapannya. Di sisi lain, perusahaan perlu menunjukkan komitmen nyata dengan mengimplementasikan prinsip manajemen syariah secara konsisten dan memberikan pelatihan bagi karyawan agar memahami nilai-nilai syariah dengan baik. Dengan demikian, penelitian ini akan menelaah upaya penguatan manajemen syariah sebagai strategi pengembangan sektor bisnis di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini diaplikasikan untuk menganalisis penguatan dalam manajemen syariah, melalui wawancara mendalam dengan para pelaku di industri bisnis serta analisis dokumen yang relevan. Populasi yang menjadi fokus penelitian mencakup perusahaan atau organisasi yang terlibat dalam sektor bisnis. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan kriteria mencakup perusahaan yang sudah mengintegrasikan manajemen syariah dalam kegiatan operasional mereka.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, serta pengumpulan dokumen seperti laporan produksi dan pemasaran. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait penerapan manajemen syariah.

Hasil dan Pembahasan Manajemen Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As Sunnah serta konsensus para ulama banyak menekankan pentingnya kehidupan yang tertata, benar, teratur, dan sistematis. (Didin Hafidhuddin, 2008:1). Konsep dan teori manajemen yang kita terapkan saat ini sebenarnya bukanlah hal yang asing dalam pandangan Islam. Manajemen sebenarnya sudah ada setidaknya sejak Allah menciptakan jagat raya beserta segala isinya. Unsur-unsur manajemen dalam penciptaan alam dan makhluk lainnya tidak terpisahkan dari pengaturan langit. Ketika Nabi Adam berperan sebagai pemimpin alam ini, dia telah menerapkan elemen-elemen manajemen tersebut.

Manajemen dalam konteks Islam sangat terkait dengan pemahaman ini. Sejak awal perkembangan Islam, manajemen dianggap sebagai suatu bentuk kepemimpinan. Namun, konsep manajemen telah diterapkan di berbagai negara di seluruh dunia. Pemikiran mengenai manajemen

dalam Islam didasarkan pada nash-nash Al-Qur'an dan arahan Al-Sunnah. Di samping itu, ia juga berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam masyarakat pada waktu tersebut. Berbeda dengan manajemen konvensional yang bersifat bebas nilai dan berorientasi semata-mata pada hasil duniawi, manajemen dalam Islam mengandung dimensi moral dan spiritual. Untuk mewujudkan bangsa yang mandiri, seluruh sektor kehidupan dan pembangunan nasional memerlukan keterlibatan sumber daya manusia Indonesia yang kompeten. Apabila hal ini diabaikan, sektor-sektor tersebut berpotensi diisi oleh tenaga asing, sejalan dengan dinamika dunia modern yang semakin terbuka. (Dewi Noratika, 2016).

Manajemen syariah merupakan suatu metode pengelolaan yang berlandaskan pada ajaran-ajaran syariah Islam saat menjalankan fungsi manajerial. Berikut ini adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip manajemen syariah yang relevan. Prinsip keadilan menuntut manajer untuk menyediakan perlakuan yang setara kepada semua pihak, serta menghindari praktik diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak-hak individu atau kelompok tertentu. Prinsip kepatuhan mewajibkan manajer untuk mengikuti seluruh ketentuan hukum syariah yang berlaku ketika melakukan aktivitas bisnisnya.

Prinsip keterbukaan mengharuskan pemimpin untuk melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keputusan dihasilkan melalui diskusi dan kesepakatan bersama. Prinsip transparansi mewajibkan pemimpin untuk menyampaikan semua informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan, agar mereka dapat dengan baik memahami situasi bisnis. Prinsip tanggung jawab sosial mendorong pemimpin untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat secara luas saat melaksanakan kegiatan bisnis mereka. Prinsip kepercayaan menekankan pentingnya integritas dan kredibilitas dalam diri seorang pemimpin ketika menjalankan tanggung jawabnya, serta menghindarkannya dari tindakan yang bertentangan dengan etika bisnis. Adapun prinsip keberlanjutan mengajarkan agar pemimpin menjalankan kegiatan usaha dengan memperhatikan aspek kelestarian dan kesinambungan, mempertimbangkan manfaat jangka panjang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang demi keuntungan cepat. Prinsip-prinsip manajemen syariah ini menjadi pedoman moral dan operasional bagi para manajer untuk menegakkan etika bisnis serta menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. (Budiono 2017).

Islam merupakan suatu rangkaian nilai yang hidup dan memiliki wawasan mengenai manajemen. Dalam buku "Manajemen syariah dalam praktek," Didin dan Hendrin menyatakan bahwa manajemen dapat dianggap memenuhi tuntutan syariah jika: manajemen yang diterapkan sesuai dengan tingkah laku yang berhubungan dengan keyakinan dan tauhid. Selanjutnya, manajemen syariah juga sangat memperhatikan struktur organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan kemampuan individu tidaklah serupa. Manajemen syariah mengkaji aspek sistem, yang dirancang agar penggerak di dalamnya beroperasi secara teratur dan selaras dengan layanan lembaga keuangan yang berlandaskan syariah. Sistem ini sangat terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian. Menurut pandangan Karebet dan Yusanto, manajemen dalam Islam dapat ditinjau melalui dua perspektif, yakni sebagai disiplin ilmu dan sebagai bentuk aktivitas. Sebagai disiplin ilmu, manajemen muncul dari pengalaman empiris manusia dan tidak memiliki keterikatan dengan sistem nilai atau peradaban tertentu. Namun, ketika dipahami sebagai aktivitas, manajemen menjadi bagian dari amal yang memiliki dimensi pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Oleh sebab itu, praktik manajemen harus dijalankan sesuai dengan ketentuan

syariat serta nilai-nilai dan etika yang bersumber dari peradaban Islam. (Yusanto dan Karebet, 2007:13)

Prinsip-Prinsip Manajemen Bisnis dalam Islam

Menurut Humayon Dar sebagaimana dikutip A. Riawan Amien dan Tim FEBS FEUI, (2010: 68) bahwa Islamic Management setidaknya dibangun atas 8 (delapan) prinsip, yaitu :

- a. Dibutuhkan seorang manajer untuk mengenali dan/atau menjelaskan tujuan utama dari perusahaan serta untuk merumuskan strategi operasional yang sejalan. Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, manajemen mengadopsi pernyataan misi yang menekankan bahwa identitas perusahaan tetap menjadi prioritas utama. Definisi dari hak-hak yang jelas dan tidak ambigu serta spesifikasi tanggung jawab dari masing-masing kelompok pelaku dalam perusahaan adalah penting demi penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Tujuannya untuk menghindari *moral hazard* dan pemenuhan kepentingan pribadi yang terjadi setiap hari dalam realitas bisnis
- b. Pengakuan serta perlindungan terhadap hak dari semua pemangku kepentingan, dan bukan hanya kepentingan dari pemegang saham, adalah hal mendasar menurut prinsip-prinsip Islam dalam mengelola usaha.
- c. Seorang manajer perlu mengumpulkan, mengolah, memperbarui, dan menampilkan informasi mengenai operasional bisnis setiap kali diperlukan bagi manfaat para pemangku kepentingan perusahaan.
- d. Menciptakan sistem insentif yang berhubungan dengan keuntungan dalam paket gaji dan bonus yang terkait dengan kinerja serta melakukan pengawasan yang tepat adalah aspek penting untuk pengelolaan yang efektif.
- e. Proses pengambilan keputusan bersifat horizontal, di mana hal ini dilakukan dengan kualifikasi yang tepat setelah melalui konsultasi dengan pemimpin.
- f. Pengembangan kualitas SDM melalui persuasi, pendidikan, dan menciptakan suasana yang sesuai dalam suatu perusahaan adalah elemen dasar dalam manajemen Islam.
- g. Mengurangi transaksi dan memantau biaya sangat krusial bagi daya saing perusahaan Islam dalam pasar yang didominasi oleh perusahaan konvensional.

Sedangkan Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa, (2012: 201) menguraikan prinsip manajemen bisnis Islam dalam konteks relasi antara pengusaha dan pekerja, di mana Islam menekankan beberapa prinsip utama sebagai berikut:

- a. Meminta agar karyawan mendapatkan bayaran yang adil dan tidak dibebani dengan tugas melebihi kemampuan mereka.
- b. Perusahaan harus menetapkan kompensasi untuk karyawan mereka sebelum merekrut dengan cara yang jelas dan logis.
- c. Pemberi kerja wajib memberikan gaji kepada karyawan secara tepat waktu.
- d. Karyawan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang berlawanan dan merugikan kepentingan perusahaan.
- e. Di awal perjanjian, harus dijelaskan secara komprehensif tentang deskripsi pekerjaan, termasuk jenis tugas, lama kerja, tanggung jawab, sanksi, jalur karier, dan hal lainnya yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Konsep- Konsep Manajemen Syariah

Landasan utama manajemen syariah berorientasi pada pencapaian hasil yang optimal dengan tujuan memperoleh keridaan Allah SWT. Dengan demikian, setiap bentuk tindakan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan dan prinsip-prinsip hukum Allah SWT. (Darwis 2013). Gagasan manajemen syariah terdiri dari komponen dan pedoman yang harus diikuti dalam suatu perusahaan (Herzeqovina 2020). Itu setara dengan rencana atau gambaran tentang pekerjaan yang ingin dicapai oleh lembaga di masa mendatang. Organisasi berperan sebagai wadah yang mengatur peran setiap individu dalam interaksi profesional, baik secara institusional maupun horizontal. Koordinasi diartikan sebagai upaya untuk menyelaraskan kegiatan demi mencapai hasil yang optimal. Adapun fungsi kontrol mencakup kegiatan pengawasan, pemantauan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan rencana yang telah disepakati. Nilai-nilai utama yang menjadi pedoman dalam proses tersebut meliputi keikhlasan, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan akuntabilitas. Dengan berpegang pada prinsip manajemen yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, penyelesaian rencana yang telah dirancang akan menjadi lebih mudah serta memperoleh keberkahan dan ridha Allah SWT (Ilyas 2017). Konsep manajemen telah berkembang sejak berabad-abad yang lalu, apabila dikaitkan dengan upaya kolektif suatu kelompok masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama (Rivai, 2010). Manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur (Hasibuan, 2013).

Asas-asas Manajemen menurut Alquran

Asas-asas manajemen menurut al-qur'an diantaranya adalah musyawarah, efektif dan efisien dalam setiap aktivitas pekerjaan dan terakhir asas kebersamaan dimana manajemen tidak akan terlaksana tanpa adanya kebersamaan antara unsur-unsur yang ada didalam manajemen. Dalam hal asas-asas ini Alquran memberikan dasar sebagai berikut:

a. Beriman

Diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 28 yang berarti:

Artinya: “Janganlah orang-orang mengambil (memilih) orang-orang kafir menjadi wali (Pemimpin) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, lepaslah ia dari pertolongan Allah”.

b. Bertaqwa

Diterangkan dalam surat An-Naba': 31 yang berarti:

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa, mendapat kemenangan.”

c. Azas Keseimbangan dan Keadilan

Menurut Nuruddin, konsep keadilan dan keseimbangan memiliki cakupan yang sangat luas karena berkaitan hampir dengan seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Dalam Al-Qur'an, kata '*adl* (adil) disebut sebanyak tiga puluh satu kali, belum termasuk istilah lain yang memiliki makna serupa seperti *al-qisth* (keadilan), *al-wazn* (keseimbangan), dan *al-wasth* (moderat). (Amiur Nuruddin, 1995, 26)

d. Musyawarah

Diterangkan dalam surat As-Syu'ara: 38 yang berarti:

Artinya: “..... Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.”

Untuk penyelesaian sengketa keperdataan secara damai dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu atas prakarsa para pihak sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah (mediator). Keterlibatan pihak ketiga biasanya menjadi pilihan ketika para pihak yang berkonflik

tidak mampu mencapai kesepakatan damai secara langsung. Proses penunjukan mediator dapat dilakukan baik melalui jalur formal maupun nonformal. Institusi formal yang berfungsi secara khusus untuk menangani sengketa dikenal sebagai arbitrase. (Chuzaimah Batubara, 2015, 23)

Dalam hukum Islam, konsep arbitrase lebih umum dikenal dengan sebutan tahkîm. Istilah tahkîm berasal dari kata “hakkama,” yang secara harfiah berarti memilih (seseorang) untuk menjadi penengah. Dalam terminologi, tahkim dapat diartikan sebagai penunjukan seseorang untuk bertindak sebagai penengah dalam menyelesaikan perselisihan atau konflik. Dengan kata lain, tahkim adalah proses di mana dua pihak yang berselisih menyerahkan permasalahan mereka kepada individu yang mereka percayai untuk memberikan keputusan. Mengingat tahkim merupakan kegiatan menunjuk penengah, maka individu yang dipilih tersebut disebut hakam. Sifat-sifat yang harus dimiliki seseorang dalam manajemen adalah:

- a. Berpengetahuan luas, kreatif, inisiatif, peka, lapang dada, dan selalu tanggap dalam hal apapun (QS. Al Mujadilah: 11).
- b. Bertindak adil, jujur dan konsekuen (QS. An Nisa: 58).
- c. Bertanggung jawab (QS. Al-An'am: 164).
- d. Selektif dalam memilih informasi (QS. Al Hujurat: 6).
- e. Memberikan peringatan (QS. Adz-Dzariyat: 55).
- f. Memberikan petunjuk dan pengarahan (QS. As-Sajdah: 24).

Perspektif Manajemen Syariah

Pada masa awal perkembangan Islam, manajemen dipahami sebagai suatu disiplin ilmu sekaligus keterampilan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Dalam terminologi Arab, istilah *idārah* digunakan untuk menyebut manajemen, yang secara etimologis bermakna “berputar” atau “melingkar.” Dalam konteks bisnis, makna tersebut menggambarkan bahwa kegiatan usaha berlangsung dalam suatu siklus yang berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen dapat dimaknai sebagai kemampuan seorang pemimpin atau manajer dalam mengelola aktivitas bisnis agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Amin menjelaskan manajemen dari sudut pandang ilahi sebagai "Melaksanakan kehendak Tuhan oleh masyarakat" atau mewujudkan kehendak Tuhan melalui individu.

Dalam perspektif Islam, kegiatan pengelolaan dipandang sebagai bentuk amal saleh yang harus dilandasi oleh niat yang ikhlas. Niat yang baik tersebut akan menumbuhkan motivasi untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Terdapat empat prinsip utama yang menjadi fondasi manajemen dalam pandangan Islam, yaitu kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan kompetensi. Seorang manajer perlu menginternalisasi keempat nilai tersebut agar proses manajemen yang dijalankan mampu memberikan hasil yang optimal. (Undang Ahmad Kamaluddin, 2009, 39)

Manajemen Islami melihat manajemen sebagai sesuatu yang sangat berbeda dari pendekatan konvensional. Dalam manajemen konvensional, manusia dianggap sebagai entitas ekonomi, sedangkan dalam Islam manusia merupakan makhluk spiritual, yang mengakui kebutuhan baik material (ekonomi) maupun *immaterial*. (Ridwan Amin, 2010, 67)

Sistem ekonomi Islam merupakan salah satu instrumen yang paling banyak diterapkan dalam praktik ekonomi masyarakat modern. Meski demikian, umat Islam tidak sepenuhnya dapat melepaskan diri dari pengaruh sistem ekonomi konvensional yang telah lama berkembang. Dengan memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam, diharapkan umat Islam mampu menemukan solusi yang

tepat dalam mengelola persoalan ekonomi, sehingga dapat bersikap lebih bijak dan cermat menghadapi dinamika ekonomi global masa kini.

“Sesungguhnya Allah mencintai hamba Nya yang bekerja. Barangsiapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untk keluarganya maka sama dengan mujahid di jalan Allah”. (HR Ahmad). (Isnaini Harahap, 2015, 17). Ada empat kriteria yang perlu dipenuhi agar dapat dianggap sebagai manajemen yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu:

- a. Manajemen yang Islami harus berlandaskan pada nilai-nilai serta etika yang diajarkan dalam Islam.
- b. Harus ada imbalan yang ekonomis dan penekanan pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi karyawan.
- c. Aspek kemanusiaan dan spiritual memiliki tingkat kepentingan yang setara dengan imbalan ekonomis.
- d. Sistem dan struktur organisasi sama pentingnya. (Abu Sinn Ahmad Ibrahim, 2008. 34)

Aspek-Aspek Penting Dari Manajemen Syariah Dalam Industri Bisnis

Manajemen syariah merupakan suatu sistem pengelolaan yang berlandaskan pada ajaran dan prinsip syariah Islam, yang menekankan aspek moral, keadilan, keterbukaan, transparansi, serta tanggung jawab. Dalam konteks bisnis modern, penerapan manajemen syariah menjadi hal yang esensial untuk memastikan bahwa setiap produk dan proses operasional sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap elemen-elemen kunci manajemen syariah menjadi sangat penting dalam dunia industri.

Manajemen syariah perlu menjamin bahwa setiap komponen, tahap produksi, dan hasil akhir sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta memastikan bahwa risiko yang berhubungan dengan produksi dan pemasaran dikelola secara efektif. Fokus utama adalah pada penerapan etika bisnis yang baik, yang meliputi nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang relevan, serta bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan baik, mempertimbangkan hak-hak karyawan, kesetaraan dalam sistem penggajian, dan kesempatan untuk pengembangan karir.

Dalam ranah bisnis, manajemen syariah memegang peranan penting dalam memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang dihasilkan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, seluruh aspek yang telah disebutkan sebelumnya harus diterapkan secara konsisten dan teliti agar tercapai kesesuaian dengan nilai-nilai syariah sekaligus mendukung keberlanjutan dan kemajuan industri secara keseluruhan.

Syariah dalam Fungsi Perencanaan

Dalam kajian manajemen, perencanaan dipandang sebagai landasan utama bagi tahapan-tahapan selanjutnya. Proses perencanaan memiliki tujuan untuk mewujudkan visi organisasi secara menyeluruh. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan mencakup sejumlah komponen penting, salah satunya adalah penetapan tujuan yang hendak dicapai.

- a. Memutuskan dan menetapkan metode yang akan digunakan untuk meraih sasaran berdasarkan pilihan alternatif yang tersedia.
- b. Tindakan atau langkah yang diambil untuk mencapai sasaran berdasarkan alternatif yang dipilih.

Selain spek-aspek tersebut, kegiatan perencanaan juga memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Dengan adanya perencanaan, pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara efisien dan efektif.
- b. Dapat dinyatakan bahwa sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik dan memungkinkan untuk melakukan penyesuaian terhadap deviasi yang terjadi sejak dini.
- c. Dapat mengenali berbagai rintangan yang muncul dengan cara mengatasi tantangan dan ancaman yang ada.
- d. Dapat mencegah terjadinya pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah serta tidak terkendali.
- e. Menunjukkan kesiapan perusahaan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- f. Memberikan dorongan kepada manajemen perusahaan dalam melaksanakan aktivitas operasional.

Fungsi Perencanaan Menurut Syari'ah

Sejalan dengan apa yang disebutkan di atas, sangat penting untuk memahami peran-peran dari perencanaan itu sendiri, yaitu:

- a. Menentukan titik tolak dan tujuan usaha.

Tujuan adalah hal yang ingin diraih yang menjadi target, sementara perencanaan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai target tersebut. Setiap usaha yang efektif perlu memiliki awal, dasar, dan arah tujuan yang jelas. Contohnya, seseorang yang berkeinginan untuk melakukan perjalanan dari Bandung ke Surabaya dengan kereta api. Dalam contoh ini, Surabaya adalah tujuan, sementara kereta api berperan sebagai strategi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut.

- b. Memberikan pedoman, pegangan dan arah.

Suatu perusahaan perlu menyusun perencanaan yang matang untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Tanpa adanya perencanaan yang jelas, organisasi akan kehilangan arah, pedoman, dan dasar pijakan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Hal ini dapat diibaratkan seperti seorang pilot yang menerbangkan pesawat tanpa mengetahui tujuan akhirnya, apakah menuju Australia, Belanda, atau Inggris, sehingga perjalanan menjadi tidak terarah dan berisiko tinggi

- c. Mencegah pemborosan waktu, tenaga dan material.

Dalam proses penentuan alternatif perencanaan, penting untuk menilai sejauh mana pilihan yang diajukan bersifat realistis dan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki, serta berpotensi efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagai contoh, apabila sebuah perusahaan menetapkan target peningkatan omzet penjualan sebesar 10% pada tahun mendatang, maka diperlukan strategi promosi yang tepat. Beberapa opsi mungkin tersedia, seperti melalui radio, majalah, atau surat kabar. Namun, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran, perusahaan dapat memilih surat kabar sebagai media promosi yang paling efisien dan relevan. Selanjutnya, perencanaan yang komprehensif juga mencakup evaluasi terhadap jenis surat kabar yang digunakan, waktu penayangan iklan, serta penentuan judul atau pesan promosi yang paling efektif untuk menarik minat konsumen.

- d. Memudahkan pengawasan.

Dengan perencanaan yang jelas, kita bisa mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi karena perencanaan menjadi acuan dan standar dalam menjalankan suatu bisnis. Untuk menyusun rencana yang efektif, seorang manajer perlu memiliki informasi yang komprehensif, terpercaya, dan terkini.

e. Kemampuan evaluasi yang teratur.

Melalui perencanaan, kita bisa memahami apakah usaha yang kita lakukan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan begitu, kita dapat menghindari perencanaan yang kurang matang maupun berlebihan.

f. Sebagai alat koordinasi.

Perencanaan di sebuah organisasi sering kali sangat rumit, karena proses ini mencakup banyak aspek yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan konflik yang dampaknya bisa cukup serius. Kita bisa mengambil contoh perjalanan sebuah kereta api yang tanpa adanya pengaturan yang tepat, bisa berpotensi mengalami kecelakaan.

Pengambilan Keputusan Perencanaan dalam Tinjauan Syari'ah

Rumusan perencanaan adalah proses penetapan terlebih dahulu mengenai apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Proses ini mencakup identifikasi langkah-langkah strategis yang disusun berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi, serta memperhitungkan berbagai masukan (*inputs*) dan hasil yang diharapkan (*outputs*). Dalam konteks organisasi atau kelompok, keberhasilan yang ingin dicapai tidak dapat dipisahkan dari adanya perencanaan yang matang, karena *planning* menjadi elemen fundamental dalam menentukan arah dan strategi pencapaian tujuan.

Sementara itu, pengambilan keputusan merupakan rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan melalui pemilihan alternatif terbaik. Proses ini berlangsung di seluruh tingkatan organisasi, mulai dari pimpinan tertinggi hingga unit operasional. Setiap manajer berperan dalam mendukung proses pengambilan keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Secara umum, keputusan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu keputusan terprogram dan tidak terprogram, serta dapat dibedakan berdasarkan tingkat kepastian, risiko,

Keputusan terprogram merupakan pilihan yang diambil berdasarkan kebiasaan, standar, atau langkah-langkah yang dilakukan secara konsisten dan berulang. Contoh-contoh termasuk penentuan gaji pegawai, prosedur penerimaan pegawai baru, promosi jabatan, dan hal-hal serupa. Keputusan tidak terprogram, atau non-programmed decisions, adalah pilihan yang diambil akibat adanya masalah-masalah tertentu atau yang jarang terjadi. Misalnya: pengalokasian sumber daya dalam organisasi, penurunan tajam dalam penjualan, adopsi teknologi terbaru, dan lainnya. Keputusan yang melibatkan kepastian, risiko, dan ketidakpastian, dipengaruhi oleh berbagai aspek yang tidak bisa diprediksi atau dijamin sebelumnya, seperti reaksi dari pesaing, perubahan dalam ekonomi, perkembangan teknologi, perilaku konsumen, dan lain-lain. Oleh karena itu, situasi ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kepastian merupakan keadaan di mana seseorang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, berkat adanya data yang tepat dan tanggung jawab.
2. Resiko merujuk pada situasi di mana kesempatan atau kemungkinan dari berbagai hasil yang mungkin muncul dapat diketahui, namun organisasi atau perusahaan tidak memiliki informasi yang komprehensif.
3. Ketidakpastian terjadi ketika seorang manajer tidak memiliki pemahaman tentang kemungkinan yang ada dan tidak bisa memprediksi keadaan yang akan datang, karena kekurangan informasi yang diperlukan. Ini biasanya berkaitan dengan keputusan yang sangat penting dan menarik.

Proses Pembuatan Keputusan

Pengambilan keputusan dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda. Dari perspektif yang sempit, pengambilan keputusan merujuk pada tindakan memilih antara berbagai pilihan yang tersedia. Dari sudut pandang yang lebih luas, pengambilan keputusan mencerminkan langkah-langkah dimana serangkaian aktivitas dipilih untuk menyelesaikan masalah yang spesifik. Proses pengambilan keputusan mencakup seluruh rangkaian kegiatan untuk mencapai suatu keputusan, mulai dari pengenalan masalah hingga pengembangan dan evaluasi alternatif sebelum melakukan pemilihan. Pemahaman mengenai pengambilan keputusan sebagai suatu proses dapat diperluas hingga mencakup tahap implementasi keputusan serta evaluasi terhadap hasil yang diperoleh, dengan tujuan menilai apakah diperlukan tindakan lanjutan atau penyesuaian keputusan. Pemilihan alternatif yang dianggap paling optimal dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia bagi manajer, meskipun keputusan tersebut tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan ketidaksempurnaan pertimbangan yang dimiliki oleh pengambil keputusan. (T. Hani Handoko, 2011,21)

Pengambilan keputusan (*decision making*) merupakan suatu proses yang melibatkan pemilihan serangkaian tindakan atau alternatif tertentu sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis dan rasional. (T. Hani Handoko, 2010,129-130). Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai memilih satu opsi dari beberapa pilihan yang ada untuk menentukan suatu pandangan atau tindakan yang akan dilakukan. Pembuatan keputusan merupakan proses memilih di antara berbagai opsi yang tersedia. Proses ini mencakup keseluruhan langkah untuk mencapai sebuah keputusan, dimulai dari pengenalan masalah hingga pengembangan dan evaluasi berbagai alternatif sebelum akhirnya memilih satu.

Dalam pembuatan keputusan, terdapat dua kategori, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Di sisi lain, terdapat berbagai keuntungan dan kerugian yang terkait dengan proses pengambilan keputusan. Salah satu keuntungan adalah adanya pengumpulan pengetahuan serta informasi yang dapat memperluas pengalaman dan mempermudah proses pengambilan keputusan. Namun, di sisi negatifnya, muncul potensi tekanan dari lingkungan sosial yang dapat menghambat kreativitas anggota kelompok saat memberikan kontribusi ide. Ada juga berbagai metode yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Syariah dalam Pengorganisasian.

Istilah organisasi memiliki dua pengertian utama. Pertama, organisasi dipahami sebagai suatu entitas atau kelompok yang memiliki tujuan dan fungsi tertentu, sebagaimana tercermin dalam perusahaan, instansi pemerintah, rumah sakit, maupun klub olahraga. Kedua, organisasi juga merujuk pada proses pengorganisasian, yakni salah satu fungsi fundamental dalam manajemen yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelompokan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Sondang Siagian, 2005, 56)

Dalam pengertian luas, organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan individu (minimal dua orang) yang secara resmi bersatu untuk berkolaborasi dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan dalam sebuah sistem yang dikoordinasikan, bekerja sama, memberikan dorongan, dan mengatur segala sesuatu demi mempermudah pencapaian beberapa tujuan yang telah ditetapkan.

Secara etimologis, istilah *pengorganisasian* berasal dari kata *organisasi* yang diadopsi dari bahasa Inggris. Dalam konteks bahasa Arab, istilah yang sepadan adalah *an-Nizām*, yakni bentuk

ismun marfū' yang bersifat *ma'rifah*, menunjukkan makna sistem atau tata aturan yang teratur. Selain pengertian linguistik, konsep organisasi juga dapat ditemukan dalam perspektif syariah, baik melalui dasar tekstual dari Al-Qur'an maupun melalui keteladanan perilaku Rasulullah SAW. Secara eksplisit, landasan tersebut antara lain terdapat dalam firman Allah SWT pada QS. *ash-Shaff* ayat 4. Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh*".

Secara spesifik ada tiga alasan utama dibutuhkan manajemen dalam organisasi, yaitu:

1. Manajemen berperan penting dalam memfasilitasi terwujudnya sasaran organisasi maupun individu secara lebih efektif dan terarah.
2. Manajemen berperan penting dalam memfasilitasi pencapaian baik tujuan kelompok maupun individu.
3. Menjaga keseimbangan antara berbagai tujuan yang mungkin saling bertentangan, manajemen berperan dalam menyeimbangkan kepentingan serta aktivitas yang berbeda dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam organisasi, seperti pemilik, karyawan, konsumen, pemasok, dan pihak terkait lainnya, agar tercipta harmoni dan keberlanjutan dalam operasional organisasi.

Manajemen bertugas untuk menyeimbangkan berbagai sasaran dan aktivitas yang mungkin saling bertolak belakang antara individu-individu yang memiliki kepentingan di dalam organisasi, seperti pemilik, pegawai, pelanggan, penyedia, dan lainnya. Mencapai efisiensi dan efektifitas, efisiensi dan efektifitas merupakan ukuran prestasi organisasi Efisiensi dan efektifitas berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja sebuah organisasi..

Actuating (Penggerakan)

Actuating adalah adalah suatu peran yang mencakup pembinaan dan pengarahan serta motivasi individu supaya tim tersebut antusias dan bersedia untuk melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, yang paling krusial adalah pelaksanaan tindakan dalam membimbing, mengarahkan, serta mendorong karyawan agar dapat bekerja dengan baik, santai, dan dengan fokus.. Hal ini diterangkan QS. Al- Kahfi ayat 2.

Proses aktuasi mencakup kegiatan mengarahkan, memberikan instruksi, serta menyampaikan saran dan pedoman dengan keterampilan komunikasi yang efektif. Fungsi ini merupakan inti dari manajemen karena berorientasi pada pencapaian hasil yang diharapkan. Pada dasarnya, kepemimpinan menjadi pusat dari proses aktuasi, di mana seorang pemimpin harus mampu menerapkan prinsip efisiensi, menjalin komunikasi yang produktif, serta mempertimbangkan aspek fundamental berupa *who* (siapa yang terlibat), *why* (alasan tindakan), *how* (cara pelaksanaan), *when* (waktu pelaksanaan), dan *where* (lokasi pelaksanaan).

Controlling (Ar-Riqobah/Pengawasan)

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengkaji apakah pelaksanaan tugas perencanaan awal benar-benar dilaksanakan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan atau kesalahan dalam menerapkan pedoman yang telah disusun. Ar-Riqobah merujuk pada pemahaman terhadap fakta-fakta aktual sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, serta menunjukkan secara jelas referensi yang telah ditentukan dalam perencanaan awal. Ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan otoritas, penyelewengan, dan segala bentuk kebocoran yang mungkin terjadi.

Manajemen dapat dianggap sesuai dengan syariah jika: yang pertama, manajemen ini mengutamakan tindakan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keimanan dan ketauhidan. Kedua,

manajemen syariah pun mementingkan adanya struktur organisasi. Ini bisa dilihat pada surat Al-An'am ayat 65, "Allah meninggikan seseorang di atas orang lain beberapa derajat". Ini menjelaskan bahwa dalam mengatur dunia, peranan manusia tidak akan sama. Ketiga, manajemen syariah membahas soal sistem.

Sistem tersebut disusun dengan tujuan untuk menjamin agar setiap individu yang terlibat di dalamnya bertindak secara teratur dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu contoh implementasinya dapat ditemukan dalam sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yang sering dijadikan teladan sebagai bentuk pemerintahan yang ideal. Sistem tersebut mencakup unsur-unsur perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian, yang sejatinya telah diajarkan dalam tradisi Islam jauh sebelum konsep-konsep serupa muncul dalam pemikiran manajemen modern di dunia Barat. (Didin & Hendri, 2003, 48)

Pengembangan Industri

1. Pengertian Pengembangan industri

Pengembangan industri merupakan upaya terencana yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi para pegawainya. Fokus utama dari pengembangan ini adalah peningkatan kapasitas pengetahuan yang dibutuhkan guna melaksanakan tugas di masa mendatang, melalui pendekatan yang terintegrasi dengan berbagai kegiatan lain yang bertujuan mengubah dan memperbaiki perilaku kerja. (Hariandja Marihot Tua Efendi, 2020:168)

Dalam penelitian yang dikemukakan oleh A.Y. Lubis, Hafsah mendefinisikan pengembangan sebagai langkah strategis yang melibatkan peran pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dalam memberikan bimbingan serta dukungan penguatan bagi usaha kecil agar mampu berkembang menjadi usaha yang mandiri dan berdaya saing. Sementara itu, Mangkuprawira mengartikan pengembangan sebagai upaya untuk memperluas pengetahuan yang dapat diaplikasikan segera atau dimanfaatkan dalam jangka panjang. Dengan demikian, pengembangan dapat dipahami sebagai proses sistematis untuk meningkatkan efektivitas kerja melalui pemberian informasi, pembentukan sikap profesional, dan peningkatan kemampuan teknis.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengembangan mencakup seluruh aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, baik pada masa kini maupun di masa mendatang, melalui penyediaan informasi dan pengarahan yang tepat. Pembangunan industri dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam konteks modern serta mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Industri memiliki keterkaitan erat dengan upaya peningkatan mutu sumber daya manusia serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan potensi lainnya. Oleh karena itu, industri berperan sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sekaligus memperluas cakupan aktivitas ekonomi manusia.

Perkembangan sektor industri menjadi salah satu sasaran utama dalam pembangunan ekonomi, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, inovatif, serta berdaya saing tinggi. Sektor industri juga berfungsi sebagai penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja baru yang berkontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Potensi industri di Indonesia sangat beragam dan melimpah, tersebar di berbagai wilayah dari Sabang hingga Merauke, masing-masing dengan

keunggulan kompetitif yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat perekonomian nasional.

2. Faktor yang mempengaruhi industri

Mengingat keterkaitan yang kompleks antara berbagai aspek dalam aktivitas industri, High Smith (1963) mengklasifikasikan sejumlah syarat serta faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan usaha dan kegiatan industri, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber Daya. Sumber daya, terutama sumber daya alam yang mendukung industri utama mencakup: bahan baku, energi, cadangan air, iklim, dan bentuk permukaan tanah.
- b. Aspek Sosial. Aspek sosial yang berpengaruh terhadap pengembangan dan kegiatan industri meliputi: ketersediaan tenaga kerja, kemampuan teknologi, serta kemampuan dalam manajemen.
- c. Elemen Ekonomi. Aspek ekonomi yang paling krusial termasuk: pasar, sistem transportasi, investasi, isu harga lahan, dan pajak. Kebijakan dari Pemerintah. Kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada industri dan pengembangannya, seperti: peraturan perpajakan dan tarif, pembatasan pada impor dan ekspor (dukungan untuk produk industri lokal dan promosi ekspor), batasan jumlah dan jenis industri, lokasi industri, serta peningkatan kondisi dan iklim yang mendukung usaha, dan lain sebagainya.

3. Indikator Pengembangan industri

Ada tiga faktor yang menunjukkan perkembangan dalam sektor industri, yaitu:

- a. Aspek sosial merupakan faktor krusial dalam mendorong kemajuan industri, karena berhubungan dengan ketersediaan tenaga kerja, tingkat keterampilan, penguasaan teknologi, serta kapasitas manajerial yang dimiliki oleh masyarakat.
- b. Aspek ekonomi juga memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan industri, terutama dalam hal modal dan pemasaran produk yang dihasilkan.
- c. Selanjutnya, aturan dan kebijakan pemerintah turut berperan dalam pertumbuhan dan eksistensi industri, misalnya melalui regulasi pajak, tarif, dan pengaturan impor serta ekspor. Ketiga faktor di atas saling mendukung dan memengaruhi perkembangan industri secara keseluruhan.

Industri Bisnis

Banyak orang percaya bahwa industri hanyalah serangkaian kegiatan ekonomi di mana bahan baku diolah menjadi produk setengah jadi atau akhir. Walaupun definisi industri sangat luas, proses industri melibatkan segala kegiatan manusia dalam bidang tertentu yang bersifat produktif dan berorientasi pada pasar. Istilah industri diambil dari bahasa Perancis Kuno “industria” yang mengacu pada aktivitas, namun kata itu terpengaruh terutama dari istilah Latin “Industria” yang berarti keterampilan dan aksi.

Industri merupakan sebuah aktivitas atau usaha yang mengolah bahan baku atau produk setengah jadi menjadi produk akhir yang memiliki nilai tambah untuk memperoleh keuntungan. Proses perakitan atau assembling serta perbaikan termasuk dalam kategori industri. Produk yang dihasilkan oleh industri tidak hanya berupa barang fisik, tetapi juga mencakup layanan. Menurut Sandi (2010:148), industri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang berfokus pada produksi barang jadi dari bahan mentah atau bahan baku melalui proses pengolahan dalam skala besar, dengan tujuan menghasilkan produk berkualitas tinggi pada biaya serendah mungkin.

Sementara itu, perindustrian dipahami sebagai suatu proses ekonomi yang mencakup kegiatan pengolahan bahan baku, bahan setengah jadi, maupun barang jadi menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih besar bagi konsumen, serta mencakup aktivitas yang berkaitan dengan desain dan rekayasa industri. Adapun sektor industri secara umum mengacu pada bidang usaha yang mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi produk akhir yang bernilai tambah dan berorientasi pada peningkatan keuntungan serta efisiensi ekonomi.

Usaha merakit atau assembling dan kegiatan perbaikan merupakan elemen dari sektor industri. Output dari industri tidak hanya terbatas pada produk fisik, melainkan juga mencakup layanan. Industri berperan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, proses industrialisasi juga terkait dengan upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan Undang-Undang Perindustrian Nomor 5 Tahun 1984, industri diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang melibatkan pengolahan bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi menjadi produk dengan nilai guna yang lebih tinggi, serta mencakup aktivitas perancangan dan rekayasa industri. Dari perspektif geografi, industri dipandang sebagai suatu sistem yang merupakan perpaduan antara subsistem fisik dan subsistem manusia, yang saling berinteraksi dalam proses produksi dan distribusi. (Sumaatmaja, 2008).

Pembangunan sektor industri idealnya diarahkan pada peningkatan kapasitas ekspor produk industri ke pasar internasional dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan permintaan pasar domestik. Selain itu, perluasan kesempatan kerja menjadi aspek penting dalam mendukung perkembangan industri nasional, yang selaras dengan penguatan gerakan penggunaan produk dalam negeri guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Djojohadikoesoemo, 2004:54)

Secara etimologis, istilah *industri* berasal dari bahasa Latin *industria*, yang bermakna tenaga kerja atau aktivitas kerja. Dalam konteks umum, istilah ini digunakan untuk menggambarkan seluruh bentuk kegiatan manusia yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan. Menurut Sukirno, industri diartikan sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi di sektor sekunder, seperti industri tekstil, industri perakitan, dan industri rokok. Dengan demikian, industri dapat dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang berfokus pada pengolahan bahan mentah, bahan baku, atau barang setengah jadi menjadi produk dengan nilai guna yang lebih tinggi. (Sadono Sukirno, 2005:54)

Menurut M. Sholahuddin, industri diartikan sebagai seluruh bentuk kegiatan yang bertujuan mengubah suatu barang menjadi produk lain yang memiliki nilai guna lebih tinggi, sehingga memiliki harga jual yang lebih besar. Selain istilah *industri*, terdapat pula istilah *industrialisasi* yang sering digunakan dalam konteks perekonomian. Industrialisasi dipahami sebagai suatu proses interaktif yang melibatkan pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, serta kegiatan perdagangan, yang secara keseluruhan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong terjadinya perubahan dalam struktur ekonomi. (M. Sholahuddin, 2007:177)

Sedangkan Menurut Irzan Azhari Saleh, industri di Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan eksistensinya ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

- a. Industri lokal merujuk pada kelompok usaha yang bertahan hidup berdasarkan pasar yang kecil dan terdistribusi secara geografis. Usaha ini beroperasi dalam skala yang sangat terbatas, sementara fokus pemasarannya juga sempit, sehingga kendaraan yang digunakan sangat sederhana, seperti sepeda dengan keranjang.

- b. Industri sentra merupakan kelompok usaha yang memiliki skala kecil per unitnya, tetapi membentuk sebuah kawasan industri melalui kumpulan unit yang memproduksi barang serupa untuk segmen pasar tertentu. Tipe industri sentra umumnya melayani pasar yang lebih luas dibandingkan dengan industri lokal.
- c. Industri mandiri adalah kategori usaha kecil yang masih dianggap sebagai bisnis kecil, tetapi dalam proses pengelolaan produknya dapat mengadopsi teknologi modern serta menjangkau target pasar yang lebih luas.

Mengenal Pengertian Industri dan Klasifikasinya

Berdasarkan buku Lebih Dekat dengan Industri 4.0, Akmal, (2019), pengertian industri dan klasifikasinya serta kegiatan bisnis merupakan dua elemen yang saling berkaitan. Semuanya saling mendukung dalam aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Secara umum, definisi industri merujuk pada bagian ekonomi yang berhubungan dengan pembuatan, pengolahan, serta penyaluran barang dan jasa. Sektor ini mencakup aktivitas ekonomi yang melibatkan transformasi bahan baku menjadi barang jadi atau penyediaan layanan kepada pelanggan. Industri merupakan salah satu elemen fundamental dalam ekonomi suatu negara. Perannya sangat krusial dalam perkembangan ekonomi. Sektor industri dapat dipisahkan berdasarkan berbagai aspek, seperti jenis barang atau jasa yang dihasilkan, metode produksi, atau tujuan usaha.

Advertisement

Berikut adalah pengelompokan sektor industri berdasarkan tipe produk atau layanan yang diberikan:

a. Industri Manufaktur

Sektor manufaktur mencakup proses pembuatan barang fisik yang berasal dari bahan baku atau bahan mentah. Terdiri dari berbagai bidang seperti industri makanan, otomotif, tekstil, elektronik, farmasi, dan lainnya. Industri Pertanian Sektor pertanian berhubungan dengan produksi makanan serta komoditas dari hasil pertanian. Ini termasuk pertanian tanaman, peternakan, perikanan, dan kehutanan, mencakup aktivitas dalam bidang pertanian serta pengolahan makanan.

b. Industri Konstruksi

Sektor konstruksi terlibat dalam pembangunan serta pengembangan properti fisik, termasuk bangunan, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya.

1. Industri Jasa

Sektor jasa tidak menghasilkan barang fisik tetapi menawarkan berbagai layanan kepada pelanggan. Industri ini meliputi banyak subsektor, seperti layanan keuangan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, perhotelan, dan hiburan.

2. Industri Energi

Sektor energi berkaitan dengan produksi, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya energi. Ini mencakup minyak, gas alam, listrik, dan energi yang dapat diperbaharui.

3. Industri Transportasi

Sektor transportasi berfokus pada penyediaan layanan untuk memindahkan orang dan barang, termasuk transportasi udara, laut, darat, dan kereta api.

4. Industri Pertambangan

Sektor pertambangan melibatkan pengambilan sumber daya mineral dan logam, termasuk emas, batu bara, tembaga, nikel, dan lain sebagainya.

Bisnis

Bisnis dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menciptakan keuntungan. Aktivitas tersebut dapat mencakup pembuatan, distribusi, penyediaan, atau penjualan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Pada dasarnya, semua kegiatan dianggap sebagai bisnis jika memiliki tujuan ekonomi, yaitu untuk menghasilkan manfaat sosial dengan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengertian mengenai industri dan kategorinya sangat berkaitan dengan dunia bisnis. Industri adalah salah satu basis utama untuk memproduksi barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam aktivitas ekonomi bisnis. Usaha bisnis sangat tergantung pada kegiatan industri untuk menghasilkan pendapatan. Para produsen dan penyedia jasa mendapatkan uang dari output yang mereka hasilkan. Selain itu, bisnis juga memiliki peran krusial dalam penjualan, distribusi, dan pemasaran produk-produk dari industri.

Konsep bisnis

Dalam dunia bisnis, keberadaan sebuah konsep merupakan aspek yang sangat fundamental dan tidak dapat diabaikan. Konsep awal memiliki peranan penting karena mencakup unsur-unsur dasar yang meliputi nilai-nilai, visi, serta strategi yang akan diterapkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Suatu konsep bisnis yang matang dan terarah akan menjadi fondasi kuat bagi perusahaan dalam mencapai tujuan utamanya. Selain itu, penyusunan konsep bisnis merupakan langkah awal yang harus dipersiapkan sebelum memulai suatu usaha. Hal ini berfungsi sebagai landasan dan acuan dalam menjalankan aktivitas bisnis agar lebih terarah dan efektif. Perancangan konsep tersebut perlu dilakukan melalui tahapan-tahapan sistematis yang memastikan kesesuaian antara tujuan, strategi, dan potensi yang dimiliki oleh perusahaan.

Secara umum, konsep dalam bisnis bisa diibaratkan sebagai perencanaan yang dilakukan sebelum meluncurkan usaha. Semua aspek, termasuk dalam mendirikan bisnis dengan perencanaan yang matang, akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mencapai tujuannya dengan sukses dan tidak tersesat. Konsep bisnis ini juga berfungsi untuk menjaga fokus kita dan tim dalam perusahaan agar tetap berorientasi pada tujuan yang telah disepakati. Selain bermanfaat untuk mencapai target-target dalam bisnis, konsep bisnis ini juga sering digunakan saat mencari investor untuk mendapatkan modal. Jika konsep bisnis kita menarik, memberikan keuntungan, dan realistis, maka kita akan lebih mudah mendapatkan investor di kemudian hari.

Di dalam dunia bisnis, keberadaan suatu ide merupakan hal yang sangat vital dan tidak dapat diabaikan. Ide awal memiliki peran strategis karena memuat unsur-unsur fundamental, mulai dari nilai-nilai dasar hingga strategi yang akan diterapkan dalam operasional perusahaan. Sebuah konsep bisnis yang kokoh dan terarah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan utama organisasi. Selain itu, perumusan ide bisnis perlu dilakukan sebelum kegiatan usaha dimulai agar tersedia pijakan yang jelas sebagai pedoman dalam pelaksanaan bisnis. Proses penyusunan ide tersebut harus melalui tahapan yang terencana dan sistematis, sehingga mampu menghasilkan arah dan strategi yang relevan dengan visi serta potensi perusahaan.

Secara umum, gagasan dalam dunia usaha dapat diumpamakan sebagai persiapan yang dilakukan sebelum meluncurkan usaha. Semua elemen, termasuk aspek mendirikan bisnis dengan perencanaan yang rinci, memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tujuannya secara efektif dan tidak menyimpang. Konsep bisnis ini juga berfungsi untuk menjaga fokus kita dan tim dalam organisasi agar tetap terarah pada tujuan yang sudah disepakati. Selain berperan dalam membantu

pencapaian tujuan bisnis, konsep bisnis juga memiliki fungsi strategis dalam menarik minat investor sebagai sumber pendanaan. Apabila rencana bisnis yang disusun dinilai menarik, memiliki prospek keuntungan yang jelas, serta layak secara operasional, maka peluang untuk memperoleh dukungan dan investasi dari pihak eksternal akan semakin besar di masa mendatang.

Fungsi Konsep Bisnis

Setiap individu yang terlibat dalam dunia bisnis pasti akan menghadapi atau pernah menghadapi berbagai tantangan dalam operasi usahanya dan isu-isu tersebut sering kali muncul dari luar rencana yang telah ditetapkan. Tentunya, hal ini adalah sesuatu yang umum terjadi dalam berbagai bidang. Maka dari itu, dalam dunia bisnis diperlukan sebuah perencanaan konsep yang dapat membantu mengurangi potensi risikonya.

Apakah perencanaan konsep bisnis memiliki urgensi bagi keberlangsungan suatu perusahaan? Apabila suatu organisasi bertekad untuk mempertahankan eksistensi dan keberlanjutan usahanya dalam jangka panjang, maka penyusunan konsep bisnis menjadi aspek yang sangat fundamental untuk diterapkan. Hal ini berkaitan erat dengan berbagai fungsi strategis yang dimiliki oleh konsep bisnis, sebagaimana dapat dijelaskan pada uraian berikut.

1. Merancang Strategi Bisnis dengan Detail

Seorang wirausaha selalu memerlukan rencana untuk meraih sasaran utamanya. Rencana bisnis adalah suatu tindakan atau skema yang mendukung wirausaha dalam mencapai tujuan dan bersaing di pasar. Tanpa rencana bisnis yang sesuai dan terencana dengan baik, usaha kita akan menghadapi kesulitan dalam pertumbuhan dan bersaing di pasar. Di samping itu, rencana bisnis dapat berfungsi sebagai panduan bagi para wirausaha dalam menetapkan tujuan dan mengembangkan bisnis mereka. Dengan adanya perencanaan usaha yang strategis ini, seorang wirausaha dapat mengarahkan bisnisnya untuk menjadi pemenang di pasar.

2. Bisnis Menjadi Lebih Terarah dengan Jelas

Konsep perdagangan dapat memberikan arahan kepada pengusaha dalam membuat pilihan yang benar. Dalam situasi kompetisi yang ketat dan menantang, pengambilan keputusan yang akurat menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya konsep perdagangan yang solid, sebuah bisnis berpotensi kehilangan fokus dan berjalan dengan tidak stabil. Lalu, apa konsekuensinya? Pengusaha mungkin memilih untuk menarik diri dari persaingan di pasar.

Salah satu tujuan utama dalam merumuskan konsep bisnis adalah untuk menetapkan jalur yang benar bagi perkembangan usaha tersebut. Umumnya, pengusaha memanfaatkan konsep bisnis sebagai panduan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, konsep bisnis juga berfungsi untuk menarik minat investor atau memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan.

3. Mengestimasi Perkiraan Modal

Dalam dunia bisnis, modal merupakan salah satu komponen esensial yang tidak dapat diabaikan. Modal dapat bersumber dari dua bentuk utama, yakni finansial dan nonfinansial. Modal finansial berupa dana digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan operasional usaha, mulai dari pengadaan bahan baku hingga investasi dalam aset-aset penting perusahaan. Sementara itu, modal nonfinansial berupa tenaga dan keterampilan memiliki peran vital dalam mendukung proses produksi dan pengelolaan usaha.

Konsep bisnis berfungsi sebagai pedoman dalam memperkirakan kebutuhan modal yang diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Selain itu, konsep ini juga membantu pelaku bisnis dalam menentukan besaran serta sumber pendanaan yang relevan. Komponen-

komponen yang tercakup di dalamnya dapat dijadikan dasar untuk menghitung jumlah dana yang dibutuhkan sekaligus mengidentifikasi sumber potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut secara efektif dan berkelanjutan.

4. Kredibilitas Usaha Meningkatkan

Kredibilitas adalah ukuran seberapa besar kepercayaan konsumen terhadap produk atau layanan dari suatu perusahaan. Untuk perusahaan, kredibilitas memiliki hubungan yang erat dengan sejauh mana kepercayaan dari klien, mitra usaha, sumber pembiayaan, dan lainnya. Membangun kredibilitas yang kuat bukanlah hal yang gampang bagi sebuah perusahaan. Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kredibilitas adalah dengan menerapkan konsep bisnis yang telah direncanakan sejak awal. Dengan menggunakan konsep bisnis sebagai pedoman, pengusaha dapat mengarahkan usahanya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam meningkatkan kredibilitas.

Penutup

Penguatan manajemen syariah merupakan pendekatan strategis yang relevan untuk menghadapi dinamika ekonomi global melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan bisnis. Pendekatan ini menekankan kepatuhan terhadap ketentuan syariah dengan menghindari praktik terlarang seperti riba, perjudian, dan transaksi yang tidak sesuai syariat, serta memastikan penggunaan sumber dana halal dan pengembangan produk yang sejalan dengan hukum Islam. Penerapan manajemen syariah tidak hanya mendukung keberlanjutan usaha jangka panjang, tetapi juga mendorong tanggung jawab sosial dan kepedulian lingkungan melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat sekitar.

Selain itu, implementasi manajemen syariah secara konsisten mampu meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat reputasi perusahaan, sehingga menciptakan loyalitas konsumen dan keunggulan kompetitif. Meningkatnya permintaan terhadap produk dan layanan berbasis syariah menunjukkan besarnya potensi pertumbuhan sektor ini. Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, diperlukan inovasi, kemitraan strategis, serta dukungan regulasi yang jelas dari pemerintah dan lembaga terkait. Kerangka hukum yang kuat akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, sehingga manajemen syariah dapat menjadi pedoman efektif dalam mencapai keberhasilan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Amin, A. Riawan dan Tim PEBS FEUI, 2010, *Menggagas Manajemen Syariah; Teori dan Praktik The Celestial Management*, (Jakarta: Selemba Empat)
- Arifin, Johan. 2016. “Penguatan Manajemen Syariah Melalui Total Quality Management bagi Pelaku Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Semarang.” At-Taqaddum
- Batubara, Chuzaimah. 2015. *Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah dan Adat*. (Medan: FEBI UIN Press).
- Harahap, Isnaini. Dkk. 2015. *Hadits Hadits Ekonomi..* (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Harahap, Saidurrahman. 2016. *Hukum Islam dalam Hukum Nasional” dalam Politik Islam Ala Indonesia: Kumpulan Essay Politik*. (Medan: Perdana Publishing).
- Rivai, Veithzal, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa, 2012, *Islamic Business and Economic Ethics; Mengacu Pada Al-Qur’an dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Bumi

Aksara).

Tarigan, Azhari Akmal, 2016. *Etika Bisnis Islam*, (Medan :FEBI Press)

Journal Salimiya: Vol. 6, No.4, Desember 2025, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

*Copyright of **Journal Salimiya** is the property of **Journal Salimiya** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.*

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>